

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A.P. Parlindungan, *Komentar Atas UUPA*, Cetakan VII, CV. Mandar Maju Bandung, 1990.
- _____, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Bachtiar Efendi, *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1983.
- Boedi Harsono, *Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya*, PT. Djambatan, Jakarta, 1968.
- _____, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, PT. Jambatan, Jakarta, 1999.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Eddy Ruchiyat, *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, CV. Armico, Bandung, 1984.
- Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara Di Sumatra Barat*, HuMa, Jakarta, 2010
- Moch Isneni, *Benda Terdaftar Dalam Konstelasi Hukum Indonesia Dalam Jadwal Hukum No. 13 Vol 7*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2002.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Otje Salman, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Motode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galia Indonesia, Jakarta, 1999.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Zainal Asikin (dkk.), *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

B. MAKALAH/HASIL PENELITIAN/LAPORAN

Kurdinanto Sarah, *Pendaftaran Tanah di Indonesia Saat Ini dan Kedepan*, Makalah disampaikan pada Workshop Tanah Ulayat di Sumatera Barat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Padang, 2000.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Keputusan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2000 tentang Struktur Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Deputi Pendaftaran Tanah, *Petunjuk Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, tanggal 2 Juni 1999 No. 600-2287-D.IV.

Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat, *Surat Edaran Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Barat Nomor :610.1/1771/BPN-1997 tentang Pelaksanaan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997*, Padang, 1999.

D. KAMUS

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Wojowasito dan Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Penerbit Hasta, Bandung, 1980

